



**PENGUMUMAN**  
**LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**  
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 30 Maret 2021/Periodik - 2020)

**BIDANG** : EKSEKUTIF  
**LEMBAGA** : PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH  
**UNIT KERJA** : DINAS PERHUBUNGAN

**I. DATA PRIBADI**

1. Nama : **SUMARNO**
2. Jabatan : **KEPALA BIDANG ANGKUTAN DAN KESELAMATAN JALAN DAN PERKERETAAPIAN**
3. NHK : **768542**

**II. DATA HARTA**

**A. TANAH DAN BANGUNAN** **Rp. 3.720.800.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 300 m2/72 m2 di KAB / KOTA KOTA PALU , HASIL SENDIRI Rp. 600.000.000
2. Tanah Seluas 12734 m2 di KAB / KOTA SIGI, HASIL SENDIRI Rp. 600.000.000
3. Tanah Seluas 1348 m2 di KAB / KOTA SIGI, HASIL SENDIRI Rp. 67.000.000
4. Tanah Seluas 674 m2 di KAB / KOTA SIGI, HASIL SENDIRI Rp. 33.700.000
5. Tanah Seluas 599 m2 di KAB / KOTA DONGGALA, HASIL SENDIRI Rp. 179.700.000
6. Tanah Seluas 5408 m2 di KAB / KOTA DONGGALA, HASIL SENDIRI Rp. 1.622.400.000
7. Tanah Seluas 60 m2 di KAB / KOTA DONGGALA, WARISAN Rp. 18.000.000
8. Tanah Seluas 600 m2 di KAB / KOTA KOTA PALU , HASIL SENDIRI Rp. 600.000.000

**B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN** **Rp. 265.000.000**

1. MOBIL, MITSUBISHI KUDA VBG5WGLS Tahun 1999, HASIL SENDIRI Rp. 80.000.000
2. MOBIL, TOYOTA YARIS 1.5SAT Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp. 175.000.000
3. MOTOR, HONDA NC11C1CA/T Tahun 2010, HASIL SENDIRI Rp.



3.000.000

4. MOTOR, HONDA NF 100 SL Tahun 2006, HASIL SENDIRI Rp.

3.000.000

5. MOTOR, HONDA NC11BF1DA/T Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp.

4.000.000

**C. HARTA BERGERAK LAINNYA** Rp. 1.200.000.000**D. SURAT BERHARGA** Rp. ---**E. KAS DAN SETARA KAS** Rp. ---**F. HARTA LAINNYA** Rp. ---**Sub Total** Rp. 5.185.800.000**III. HUTANG** Rp. 21.436.800**IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)** Rp. 5.164.363.200

## Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id). Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id), serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.